

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021.

B. Buku-Buku

Ade Maman Suherman, (2002). Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global.

Ghalia Indonesia, cetakan I, Jakarta.

Agussalim Andi Gadjong, (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004).

Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif (PT. Rajagrafindo Persada, Depok: 2021).

B. Hestu Cipto Handoyo, (1998). Otonomi Daerah, titik berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, cetakan pertama, Penerbit Irma Jaya, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, (2009). Metodologi Penelitian Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. C.F.G.

Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni, 1989.

Dharma Setyawan Salam, (2004). Otonomi Daerah Dalam

Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Cetakan Dua, Djambatan, Bandung. J.B. Dalio, (2001). Pengantar Hukum Indonesia. PT. Prenhallindo, Jakarta.

Dr. Haryanto, CA. Sejumpt Penggalan Keuangan Daerah. Undip Press, Semarang : 2019.

Ghalia Indonesia, Cetakan I, Ciawi Bogor. Bagir Manan, (1990). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Diesertasi, UNPAD, Bandung.

Ghalia Indonesia, Jakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, SinarGrafika, Jakarta.

Hartono, Sunaryati. Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional. Alumni, 1991.

Hotma P. Sibuea., Dwi Seno Wijanarko., Dinamika Negara Hukum (PT.Rajagrafindo Persada, Depok: 2019);

Hotma P. Sibuea., Ilmu Politik Hukum (PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta:2016);

Josef Riwu Kaho, (2003). Prospek Otonomi di Indonesia. Fisipol UGM, Yogyakarta

Karianga, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media, 2017.

Letjen TNI (Purn) Dr. TB Silalahi, SH., Otonomi Daerah Percontohan (Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta: 2009);

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media,

2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014);

Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*,

Samsudin Haris, (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Cetakan Satu, Jakarta LIPI Press. Soehino, (2000). *Ilmu Negara*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

S.E.M. Nirahua, 2010, *Problematisasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut* (Disertasi).

Soeryono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Cetakan ketiga, Jakarta.

Suleman, Abdul Rahman, et al. *Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sumaryati Hartono, (1998). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung.

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.

Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Trubus Rahardiansyah., *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar Dan Relevansi Nya Untuk Ilmu Hukum* (Jakarta Universitas Trisaksi: 2006).

Titik Tri Wulantutik, (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

Aira, Aras. "Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah."

Kutubkhanah 17.1 (2015).

Aprilia, Ika, Yusman Syaukat, and A. Faroby Falatehan. "Optimisasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10.2 (2018).

Antoh, Agustina Ester. "Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai)." *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1.2 (2017).

Akadun, tentang Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011

Arie, Siti Sundari, et al. "Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta (2011).

Budi Apriyanto, G. D. *Implementasi Program Sertifikasi Aset Daerah Terkait Sekolah Yang Belum Bersertifikat Di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jember*. Diss Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar." (2010).

- Hakim, Lukman. "Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 4.1 (2011).
- Hasan Basri, Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume IX Nomor I*, 2021.
- Hariyanto, Agus. "Penggunaan Basis Akrua! Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia." *Dharma Ekonomi* 19.36 (2014).
- Hubaidi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Regulasi Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah." *commercelaw* 1.1 (2021).
- Iskandar, Ade Dais, Maulana Yusuf, and Rahmawati Rahmawati. *Strategi Manajemen Aset Daerah Di Kabupaten Serang (Studi Di Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang)*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011.
- Juliani, Henny. "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN." *Administrative Law and Governance Journal* 1.1 (2018):
- Maharani, Rizka Ananda, Bambang Utoyo, and Eko Budi Sulistio. "Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2.3 (2020):
- Martina, Lisa. *Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)*. Diss.

UIN AR-RANIRY, 2020.

Ni Luh Putu Eka Widiyanti, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, Jurnal Ilmiah, Bali: Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rajagukguk, Erman. "Pengertian keuangan negara dan kerugian negara." *Makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta 26 (2006).*

Rosyadi, Julianda. *Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara: Penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara 1945-2004*. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019.

Saggaf, Said, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Saggaf. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2018.

Shabrina, Kemala Nur. "Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2.1 (2014):

Wardhani, Ratih Kusuma. "Studi Deskriptif tentang Regulatory Accountability Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Surabaya Pasca Dikeluarkan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2016." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6.1 (2018):

Wittwer, Ernie, Jason Bittner, and Char Kasprzak. "Asset Management and City Government." *Mid-Continent*

D. Situs *Transportation Research Symposium* Iowa State University, Ames. 2003.

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah#:~:text=Tujuan%20otonomi%20daerah%20adalah%20bisa,kes tabilan%20politik%20dan%20kesatuan%20 bangsa.>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah#:~:text=Tujuan%20otonomi%20daerah%20adalah%20bisa,kes tabilan%20politik%20dan%20kesatuan%20 bangsa.> (diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 18.53 WIB).

[https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna %20NKR I%20-%20DWI/Bentuk- Negara-dan- Pemerintahan-NKRI.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna%20NKR%20I%20-%20DWI/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html), di akses pada 12 Februari 2023, pukul 16:01 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya>, di akses pada 13 Februari 2023 pukul 15:23

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya>, di akses pada 13 Februari 2023 pukul 15:23

¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7133/bab%20ii.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada 13 Februari 2023 pada Pukul 15.06 WIB

